

BAB VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Secara keseluruhan, studi ini telah mencapai tujuannya yakni menemukan dan mengembangkan sebuah model kurikulum dan strategi pembelajaran pendidikan kewiraswastaan bagi wanita pada lembaga kursus. Model ini dikembangkan dan ditawarkan berdasarkan alasan bahwa proporsi jumlah penduduk wanita lebih besar daripada penduduk laki-laki, kaum wanita memiliki potensi dan sumbangan efektif yang sangat besar dalam pembangunan, dan hampir semua pewiraswasta wanita terbentuk secara natural/alamiah saja, bahkan banyak pewiraswasta wanita yang terbentuk karena keterpaksaan situasi. Potensi dan fenomena kewiraswastaan wanita itu akan sia-sia apabila tidak ada upaya lanjutan untuk memberdayakannya. Dari serangkaian proses penelitian dan pengembangan yang dilakukan untuk menemukan dan mengembangkan model pendidikan kewiraswastaan bagi wanita pada lembaga kursus ini didapatkan beberapa kesimpulan spesifik penting sebagai berikut ini.

Berkenaan dengan hasil-hasil studi kasus, diperoleh kesimpulan sebagai berikut. *Pertama*, terdapat dua pola alokasi kurikulum pendidikan kewiraswastaan bagi wanita pada lembaga kursus. Pola pertama, pendidikan kewiraswastaan tidak disediakan/dialokasikan sama sekali sebagai kurikulum/program belajar positif. Tidak disediakan pendidikan kewiraswastaan ini pertama terjadi pada program-program kursus yang waktunya singkat atau pendek, satu sampai tiga setengah bulan. Dalam pola ini ada dua subpola, yaitu pola yang tidak menyediakan program pendidikan kewiraswastaan sama sekali, dan pola yang menyediakan program pendidikan kewiraswastaan sebagai kurikulum tersembunyi (*hidden curriculum*). Pola kedua adalah program kursus yang telah

menyediakan kurikulum pendidikan kewiraswastaan sebagai kurikulum positif yang dilaksanakan. Pola alokasi yang demikian terjadi pada program kursus yang waktunya relatif panjang, misalnya lebih dari tiga bulan sampai dengan dua tahun.

Ada kecenderungan pada lembaga dan program kursus, pendidikan kewiraswastaan belum diintegrasikan sebagai komponen program/kurikulum pendidikan. Sementara ini pendidikan kewiraswastaan pada program kursus masih dianggap sebagai pelengkap, penambah, bonus, atau kegiatan ekstrakurikuler program belajar yang keberadaannya terlepas atau terpisah dari sistem kurikulum (program) secara keseluruhan.

Ada anggapan di kalangan pengelola kursus bahwa materi belajar pendidikan kewiraswastaan tidak terlalu dipentingkan dalam program kursus. Menurut mereka, tujuan utama kursus adalah membekali para warga belajar dengan keterampilan vokasional saja. Masalah bagaimana berwiraswasta adalah persoalan lain di luar tanggung jawab lembaga kursus. Apabila pendidikan kewiraswastaan terdapat dalam program kursus maka hal itu belum bersifat substansial masih sekedar bersifat sebagai "aksesoris yang diberikan lembaga kursus kepada para peserta kursusnya. Pendidikan kewiraswastaan disampaikan secara insidental saja, sekedar sebagai rasi belajar, faktor daya pemikat bagi calon peserta kursus. Dalam kaitan ini para pengelola kursus berpendapat, apabila warga belajar sudah dapat menguasai keterampilan vokasional, maka secara otomatis warga belajar sudah mampu berwiraswasta. Tidak jarang pula para pengelola dan sebagian instruktur kursus menyarankan kepada peserta kursus agar sebelum membuka usaha, bekerja terlebih dahulu pada perusahaan orang lain atau magang. Dengan kata lain, strategi belajar pendidikan kewiraswastaan yang dipikirkan oleh pihak pengelola kursus cenderung pada belajar sendiri secara swarah setelah menguasai seperangkat keterampilan vokasional.

Pada program kursus yang berjangka lebih panjang (lebih dari tiga bulan) tersedia materi pendidikan kewiraswastaan yang dialokasikan setara dengan 2 Satuan Kredit

Semester (SKS) pada sistem belajar di perguruan tinggi. Para pengelola beranggapan bahwa dengan materi itu sudah cukup memadai sebagai bekal para peserta kursus berwiraswasta. Harapan lain adalah pengelola optimistis bahwa warga belajar akan memperoleh banyak pengalaman berwiraswasta pada saat warga belajar mengadakan praktek pengalaman lapangan atau *on-the-job training*. Alokasi sebesar itu ternyata dirasakan sangat tidak memadai oleh para peserta kursus, alumni kursus, dan para instruktur kursus.

Kedua, para warga belajar, baik pada kursus singkat maupun pada kursus jangka panjang, sangat menginginkan materi belajar pendidikan kewiraswastaan tersedia secara memadai pada kursus yang sedang dijalaninya. Mereka merasakan apa yang diterima atau dipelajari pada kursus sangat minim sebagai bekal berburu peluang kerja sebagai wiraswasta. Sementara bekal keterampilan vokasional yang didapatkan dari kursus masih sulit juga ditawarkan kepada perusahaan untuk bekerja sebagai karyawan. Para warga belajar juga menginginkan agar dalam penyampaian materi belajar oleh instruktur tidak hanya dalam bentuk ceramah, tetapi juga dalam bentuk praktek atau simulasi langsung tentang seluk-beluk berwiraswasta. Aspirasi ini diungkapkan bukan saja oleh para peserta kursus yang masih aktif, melainkan juga oleh para alumni kursus yang sudah bekerja mandiri, sebagai karyawan, ataupun yang masih sedang mencari atau merintis pekerjaan.

Sebenarnya ada kebutuhan yang dirasakan (*felt needs*) pada sebagian besar peserta kursus dan sebagian kecil lainnya tidak merasakan adanya kebutuhan akan pendidikan kewiraswastaan. Kebutuhan pendidikan kewiraswastaan ternyata merupakan kebutuhan objektif para peserta kursus agar mereka dapat langsung mampu menjual kemampuan vokasional yang dipelajari untuk mendapatkan dan/atau meningkatkan penghasilan secara mandiri. Kebutuhan yang dirasakan akan kemampuan kewiraswastaan bagi peserta kursus tersebut juga didorong oleh situasi objektif terbatasnya lapangan kerja

akibat krisis ekonomi dan kebutuhan untuk membangun ekonomi nasional berbasis ekonomi kerakyatan.

Ketiga, pada umumnya para instruktur kursus berpendapat dan menginginkan adanya pengembangan kurikulum kewiraswastaan pada program belajar kursus. Pada sisi lain, para instruktur kursus itu juga menyadari bahwa waktu yang tersedia pada program kursus relatif singkat. Bila harus ditambah dengan program pendidikan kewiraswastaan, akan menambah jumlah waktu belajar dan tambahan sumber daya belajar yang lain, yang berarti perlu pula menambah beban biaya kursus yang harus ditanggung para peserta kursus. Para instruktur kursus dan narasumber berpendapat bahwa kurikulum pendidikan kewiraswastaan bagi wanita pada kursus adalah program atau materi belajar yang bisa menumbuhkan sikap mental, keterampilan, dan kemampuan peserta kursus membuka usaha sendiri sesuai dengan bekal keterampilan vokasional yang dipelajarinya di kursus. Sedangkan strategi pembelajaran yang diharapkan adalah perlu lebih banyak praktek daripada teori-teori.

Berkenaan dengan studi pengembangan diperoleh kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut. *Pertama*, model kurikulum pendidikan kewiraswastaan bagi wanita pada lembaga kursus yang dikembangkan studi ini memiliki landasan-landasan objektif dan subjektif yang cukup kuat. Secara objektif terdapat kebutuhan mendesak untuk hadirnya wiraswastawan-wiraswastawan yang tangguh. Kemampuan kewiraswastaan kaum wanita itu demikian perlu di tengah situasi krisis ekonomi dimana lapangan kerja semakin menyempit, banyak kasus pemutusan hubungan kerja, serta menghadapi era pasar bebas ASEAN AFTA tahun 2003 dan pasar bebas Asia (APEC) tahun 2010. Kehadiran pewiraswasta wanita tangguh yang berbasis potensi sumber daya daerah atau potensi sumber daya nasional akan secara kumulatif dapat menjadi kekuatan tangguh menghadapi era globalisasi pasar bebas itu. Hadirnya wiraswastawan tangguh itu hanya bisa terwujud bila model pendidikan yang diselenggarakan diorientasikan pada

visi dan misi tersebut. Secara subjektif model ini didorong oleh kebutuhan para warga belajar untuk segera dapat memanfaatkan pelajaran yang didapatnya dari lembaga kursus untuk mencari uang atau mendapatkan penghasilan. Di tengah situasi lapangan kerja yang terus menurun jumlah dan kualitasnya, maka mengembangkan diri sebagai wiraswastawan adalah sebuah pilihan tepat. Dengan berbekal seperangkat kemampuan vokasional yang diperoleh dari kursus, seseorang segera dapat memulai untuk menjadi wiraswastawan dengan "menjual" kemampuannya itu langsung ke tengah masyarakat, bukan ke pabrik-pabrik atau perusahaan sebagai kuli atau karyawan. Dalam hal ini yang diperlukan adalah melengkapi kemampuan vokasional itu dengan kemampuan kewiraswastaan. Dengan demikian, lembaga kursus telah ikut mewujudkan lahirnya masyarakat yang menciptakan pekerjaan (*employee society*) yang memiliki kemampuan teknis, dan menghindarkan terbentuknya masyarakat buruh, masyarakat karyawan, atau masyarakat pencari kerja (*worker society*).

Kesimpulan *kedua* dari penelitian pengembangan adalah ditemukenalinya dua pola penyelenggaraan pendidikan kewiraswastaan pada program kursus, yaitu yang diselenggarakan secara terintegrasi dan yang secara terpisah. Yang dimaksud pola teritegrasi adalah pembelajaran pendidikan kewiraswastaan yang diprogramkan dan dilaksanakan secara bersamaan dan simultan dengan pelajaran vokasional. Sedangkan mata pelajaran pendidikan kewiraswastaan yang disajikan secara terpisah dan definitif bisa disebut sebagai kurikulum pendidikan kewiraswastaan positif atau bisa juga disebut sebagai *appear curriculum*. Kedua model tersebut dapat diterapkan sesuai dengan situasi dan kebutuhan belajar khalayak sasaran dengan keuntungan dan kekurangan masing-masing. Pada perkembangan selanjutnya, apabila pendidikan kewiraswastaan diselenggarakan secara terintegrasi dengan pendidikan vokasional, sebaiknya program belajar yang dialokasikan untuk pengembangan kemampuan kewiraswastaan secara efektif dialokasikan minimal sebesar 30% dari keseluruhan program belajar kursus. Distribusi dan

proporsi waktu terhadap setiap komponen kemampuan pengembangan kewiraswastaan harus disesuaikan dengan kebutuhan peserta kursus. Oleh karena itu, sebelum memulai sebuah program kursus kewiraswastaan perancang program perlu melakukan pengukuran kembali terhadap kebutuhan belajar calon peserta kursus.

Kesimpulan penelitian pengembangan *ketiga* adalah penguasaan keterampilan vokasional tingkat terampil dan tingkat mahir dapat menjadi basis yang berguna dan signifikan untuk mengembangkan kemampuan kewiraswastaan. Dengan demikian, akan lebih efektif mengembangkan kemampuan kewiraswastaan bila seseorang telah memiliki keterampilan vokasional tertentu.

Kesimpulan penelitian pengembangan *keempat* adalah untuk mengembangkan kewiraswastaan diperlukan lima kemampuan dasar, yaitu: sikap mental dan motivasi kewiraswastaan, keterampilan produksi, kemampuan manajerial, kemampuan permodalan, dan kemampuan pemasaran dan jaringan usaha. Di antara lima kemampuan dasar itu dua yang terpenting dan relevan dengan pendidikan kewiraswastaan adalah pembentukan sikap mental dan motivasi kewiraswastaan, dan kemampuan manajerial. Komponen sikap mental dan motivasi itu setidaknya mencakup ciri-ciri kepribadian yang memiliki nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan, kemandirian, kepemimpinan, pemberani, kreatif, disiplin, ulet, bermotivasi kerja tinggi, jujur, penuh perhitungan, dan berani mengambil risiko. Kemampuan manajerial itu meliputi kepemimpinan, pengetahuan tentang permodalan dan tata keuangan, negosiasi dan komunikasi bisnis, pasar dan pemasaran, perintisan dan pengembangan jaringan usaha, ketenagakerjaan, dan hukum bisnis. Di dalam formasi pengembangan sikap mental perlu pula dibangun pemahaman yang kuat, jelas, dan tegas tentang wawasan gender di bidang kewiraswastaan, dimana wanita memiliki hak, kewajiban, dan kemampuan yang sama dengan kaum pria, termasuk dalam hal kewiraswastaan.

Kesimpulan penelitian pengembangan *kelima* adalah strategi pembelajaran kewi-

raswastaan bagi wanita pada lembaga kursus akan lebih efektif bila dilaksanakan dengan pendekatan praktis/praktek, berorientasi lapangan dan pengalaman konkret dengan model-model pelatihan yang menerapkan metode-metode belajar partisipatif yang menggugah motivasi dan aktivitas peserta kursus melalui pola *on-the-job training*, *field-based training*, atau *in-house training*. Di samping itu, pembelajaran kewiraswastaan akan lebih efektif bila dilakukan dalam forum kelompok belajar usaha dan layanan belajar secara individual, sebaiknya pembelajaran tidak diselenggarakan dalam format kelas/klasikal. Pembelajaran kewiraswastaan akan lebih efektif pula bila terdapat rumusan tujuan dan komposisi materi belajar yang jelas, dikomunikasikan dan disetujui peserta kursus sebagai kontrak belajar.

Pembelajaran kewiraswastaan akan lebih efektif bila instruktur dan sumber belajar memiliki kredibilitas dan kemampuan metodologi pelatihan yang baik, khususnya kemampuan andragogi, pembelajaran partisipatif, dan memahami visi dan misi program kursus secara utuh. Komposisi instruktur atau sumber belajar sebaiknya merupakan integrasi dari para akademisi dan praktisi kewiraswastaan. Sebelum ditugaskan sebagai instruktur, sumber belajar, ataupun fasilitator kursus, sebaiknya mereka diberikan orientasi tugas dalam bentuk latihan bagi pelatih (*training of trainer*) secara memadai sehingga pada diri mereka terbentuk pemahaman yang jelas tentang tugas, tanggung jawab, serta fungsi, dan terbangun komitmen dan empati terhadap program kursus. Iklim sosial yang tercipta dalam pembelajaran kewiraswastaan pada lembaga kursus agar diusahakan mendukung tercapainya tujuan-tujuan belajar pendidikan kewiraswastaan. Iklim sosial itu sekaligus perlu didayagunakan sebagai alat pelajaran. Misalnya, di lembaga kursus dikembangkan etika yang menempatkan tinggi nilai-nilai kewiraswastaan.

Kesimpulan penelitian pengembangan *keenam* adalah dalam program kursus perlu pula dirancang dan dilaksanakan evaluasi hasil belajar dan evaluasi program. Evaluasi

pada lembaga kursus ini harus diorientasikan pada kepentingan peserta kursus untuk mengukur dan mengetahui dengan sendirinya tingkat keberhasilan belajarnya. Dengan demikian, fungsi evaluasi yang perlu diutamakan adalah fungsi *self-evaluation*, promotif, dan motivatif, bukan untuk fungsi formatif atau sumatif. Evaluasi formatif perlu dilakukan bila dimaksudkan untuk memberikan umpan balik kepada peserta kursus dan para instruktur dan pengelola kursus akan tingkat kemajuan belajar dan program belajar yang diselenggarakannya. Dengan demikian, peserta kursus mengetahui secara sadar setiap kemajuan belajar yang dicapainya. Teknik yang digunakan sebaiknya yang bersifat evaluasi diri (*self-evaluation*). Adapun evaluasi sumatif perlu dirancang, dilaksanakan, dan ditindaklanjuti secara transparan dan objektif dengan melibatkan peserta kursus melalui perwakilan mereka.

Berkenaan dengan studi validasi model temuan studi, yaitu Model Kurikulum dan Strategi Pembelajaran Pendidikan Kewiraswastaan bagi Wanita pada Lembaga Kursus, diperoleh kesimpulan umum bahwa model telah mampu menunjukkan efektivitas dan konsistensi internal serta validitas internal dalam kadar yang cukup tinggi. Efektivitas, konsistensi dan validitas internal terbukti melalui temuan empiris penerapan model pada subjek kursus, meskipun masih dilakukan secara terbatas. Validitas internal didukung pula oleh kesaksian/pengakuan dan perilaku menampak para peserta kursus, instruktur, dan pengelola kursus uji coba yang mengarah pada persetujuan dan membenaran atas konsep, prosedur, dan kemanfaatan model. Dalam kaitan ini didukung pula oleh adanya justifikasi terhadap model temuan penelitian oleh para pakar dan praktisi melalui forum seminar dan lokakarya yang diselenggarakan untuk itu. Validitas eksternal juga didapatkan melalui relevansi perbandingan dengan temuan studi sejenis lainnya

Dalam hal teknis, penerapan model ini menghadapi kendala-kendala, terutama yang bersifat budaya (dalam pengertian kebiasaan), dan sikap-sikap apriori terhadap kemampuan, kesanggupan, dan kemandirian peserta kursus dan instruktur. Dalam

perjalanan sejarahnya, sebagian besar warga masyarakat Indonesia telah terbiasa dengan pola-pola budaya belajar secara pasif, reaktif, belajar kagetan (*shock learning*), dan seadanya. Pada sisi lain, para instruktur telah terbiasa mengajar secara monolog sebagaimana pengalaman mereka waktu belajar di sekolah. Para pengelola dan instruktur kursus cenderung melakukan program kursus secara mengulang-ulang pola yang lama dan tidak berubah (*replay program*), kurang bisa melakukan pembaruan dan improvisasi. Pada sisi lain, masih dominan adanya sikap dan anggapan bahwa peserta kursus adalah pribadi bergantung yang senantiasa perlu diajari, diarahkan, dan dibentuk berdasarkan format-format baku yang sudah ditentukan. Kendala-kendala tersebut terejawantahkan dalam praktek pembelajaran yang dilakukan instruktur, pengelolaan program yang dilakukan pengelola, dan model administrasi lembaga kursus yang cenderung terlalu berorientasi bisnis, mengutamakan *profit margin* yang tinggi bagi lembaga. Berbagai kendala itu perlu diantisipasi dan dieliminasi terlebih dahulu sebelum model temuan studi ini diterapkan.

B. Rekomendasi

Model pendidikan kewiraswastaan bagi wanita pada kursus yang dikembangkan studi ini relevan dengan pengembangan sumber daya wanita dan pembangunan pada umumnya. Pengembangan sumber daya wanita merupakan salah satu isu besar dalam kajian gender. Dengan kata lain, aktualisasi wawasan gender dalam pembangunan mempersyaratkan peningkatan kemampuan kaum wanita dalam segala aspek, termasuk pendidikan. Proses pemampuan wanita melalui pendidikan kewiraswastaan yang dikembangkan studi ini bisa menjadi salah satu model penguatan kaum wanita untuk meningkatkan daya tawar personal maupun kolektif di tengah masyarakat sebagai sasaran akhir pemberdayaan. Berdasarkan proses dan temuan penelitian dengan ini disarankan dan direkomendasikan sebagai hal-hal sebagai berikut.



1. Rekomendasi untuk Penerapan Model

Dengan kesimpulan bahwa model pendidikan kewiraswastaan bagi wanita pada kursus yang dikembangkan studi ini relevan dan berguna serta bisa untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan motivasi berwiraswasta pada peserta kursus wanita, perlu diupayakan penyebarluasan penerapan model pada satuan-satuan kursus yang pesertanya adalah kaum wanita. Para penyelenggara dan instruktur kursus bagi wanita sebaiknya mempelajari dan menerapkan model pendidikan kewiraswastaan bagi wanita pada kursus ini, khususnya kurikulum dan strategi pembelajarannya. Idealnya, model pendidikan kewiraswastaan bagi wanita pada kursus ini diuji coba terlebih dahulu dengan sampel yang lebih luas sehingga lebih diketahui validitas eksternalnya secara lebih luas. Namun, dengan menyadari kepentingan mendesak dan kebutuhan praktis, agaknya uji coba lebih luas itu dapat dilakukan secara sambil jalan. Seiring dengan itu, dilakukan penyesuaian-penyesuaian sesuai situasi lokal untuk penyempurnaannya. Para warga belajar, penyelenggara kursus, dan instruktur kursus perlu mengintegrasikan pendidikan kewiraswastaan sebagai bagian integral kurikulum kursus, dan tidak memisahkannya sebagai urusan lain di luar program kursus, apalagi tidak memperhatikannya.

Pengembangan kurikulum pendidikan kewiraswastaan bagi wanita pada kursus perlu memperhatikan prinsip-prinsip pendidikan luar sekolah, khususnya dalam aspek pengembangan kurikulum. Di antara berbagai prinsip-prinsip pendidikan luar sekolah itu yang relevan dengan pengembangan kurikulum pendidikan kewiraswastaan dan strategi pembelajaran adalah (1) kurikulum kursus harus dikembangkan berdasarkan kebutuhan belajar peserta kursus, dengan demikian harus bersifat *bottom up*; (2) kurikulum bersifat desentralistis, *emergence*, dan luwes; (3) kurikulum dan strategi pembelajaran pendidikan kewiraswastaan harus ditekankan pada tataran sikap dan kemampuan praktisi kewiraswastaan, bukan pada konsep-konsep atau teori-teori yang abstrak; (4) pembelajaran kewiraswastaan pada kursus menuntut adanya pendekatan

belajar swarah, belajar siswa aktif, berpusat pada warga belajar, dan bersifat partisipatif, serta menempatkan warga belajar sebagai subjek bukan objek; dan (5) sebaiknya pola pembelajaran kewiraswastaan pada lembaga kursus diselenggarakan dengan pendekatan kelompok kecil, pembelajaran partisipatif, berorientasi lapangan, dan berkelanjutan.

Pada setiap program kursus kewanitaan perlu dialokasikan secara memadai pendidikan kewiraswastaan dan diatur strategi pembelajarannya secara efektif dan efisien. Pendidikan kewiraswastaan perlu terintegrasi dan menjadi bagian tak terpisahkan dalam satu kesatuan kurikulum kursus. Pendidikan kewiraswastaan pada lembaga kursus merupakan persoalan substansial dalam pengembangan sumber daya manusia kontemporer, sesuai dengan tuntutan kebutuhan. Janganlah menjadikan pendidikan kewiraswastaan sekedar sebagai "aksesoris" yang diberikan lembaga kursus kepada para peserta kursusnya. Pendidikan kewiraswastaan harus diprogramkan dan disampaikan secara konsisten dengan strategi belajar yang menerapkan prinsip-prinsip pendidikan luar sekolah, yaitu berpusat pada karakteristik peserta kursus, bertolak pada kebutuhan belajar peserta kursus, menggunakan pendekatan pembelajaran partisipatif, berorientasi praktis dan fungsional, dan ditindaklanjuti secara sistematis dan konsisten.

Para calon peserta kursus senantiasa perlu memikirkan hubungan dan penggunaan kemampuan vokasional yang akan dipelajari dalam mengembangkan kemampuan sebagai pekerja mandiri/wiraswasta dan menempatkannya sebagai kebutuhan. Mengikuti kursus bukanlah sekedar pengisi waktu luang, sekedar mendapatkan tambahan keterampilan tertentu, melainkan sebagai ajang membentuk diri sebagai sumber daya manusia yang produktif. Mengikuti kursus berarti butuh belajar, butuh meningkatkan kualitas diri; dan untuk itu peserta kursus telah mengeluarkan dan membelanjakan biaya langsung maupun biaya tak langsung yang besar. Biaya-biaya itu adalah sebuah investasi yang harus bisa mendatangkan keuntungan pada masa berikutnya. Di tengah lapangan

kerja yang sempit di masa krisis, membekali dan membentuk diri sebagai pewiraswasta adalah pilihan tepat.

Para penyelenggara kursus perlu memiliki sikap bahwa pendidikan kewiraswastan merupakan komponen kurikulum pelengkap yang perlu dialokasikan dalam program kursus secara terintegratif. Menyelenggarakan kursus bukanlah semata-mata urusan bisnis, melainkan urusan pengembangan sumber daya manusia. Penyelenggaraan dan instruktur kursus ikut bertanggung jawab terhadap tindak lanjut dan masa depan para peserta kursusnya, tidak terlalu didominasi oleh kepentingan dan pertimbangan-pertimbangan bisnis.

Para instruktur kursus yang bertugas/ditugaskan memfasilitasi pembelajaran pendidikan kewiraswastan perlu memiliki kompetensi metode pelatihan yang berpendekatan andragogi, pembelajaran partisipatif, dan teknik-teknik pembelajaran pendidikan luar sekolah untuk pengembangan nilai. Untuk kepentingan itu, sebelum ditugaskan sebagai instruktur, sebaiknya ada langkah pendahuluan berupa pelatihan bagi pelatih (*training of trainer*) yang bertujuan menyiapkan para instruktur tersebut memenuhi standar kualitas yang dipersyaratkan (*prasyarat instrumental input*) tersebut di muka. Pelatihan bagi pelatih atau instruktur kursus itu tentu saja ditujukan agar mereka memiliki kemampuan-kemampuan prasyarat *instrumental input* itu. Pelatihan tersebut bisa didapatkan pada lembaga pendidikan tenaga kependidikan yang membina Jurusan Pendidikan Luar Sekolah atau pada badan pendidikan dan latihan yang berkompeten, misalnya Balai Pengembangan Kegiatan Belajar.

2. Rekomendasi untuk Penelitian Lanjutan

Hasil atau temuan penelitian--khususnya model temuan ini memiliki kelemahan dalam hal daya generalisasinya pada komunitas lain di luar subjek yang diteliti. Uji coba model temuan studi ini dilakukan hanya pada satu lembaga kursus dan satu jenis

program kursus. Tidak ada kelompok pembandingan. Itupun hasil penerapan model hanya diobservasi dan diwawancarakan secara kualitatif. Dengan demikian, tentu ada kelemahan dalam hal validitas internal dan eksternalnya. Oleh karena itu, perlu ada penelitian lanjutan.

Beberapa topik atau tema penelitian lanjutan bisa dikembangkan berdasarkan hasil-hasil studi ini. Model yang dikembangkan studi selanjutnya perlu diuji secara kuantitatif melalui desain penelitian eksperimental yang lebih ketat. Sebagai variabel kriterium dapat dipilih misalnya motivasi kewiraswastaan, motivasi mendapatkan atau meningkatkan pendapatan, dan perilaku kewiraswastaannya. Lebih jauh dapat pula digunakan variabel kecepatan atau tenggang waktu memanfaatkan pengalaman belajarnya. Dengan pendekatan kuantitatif dapat pula diteliti perbedaan kecepatan memanfaatkan pengalaman belajar kursus antara peserta kursus yang mendapatkan tambahan kurikulum kewiraswastaan dengan yang tidak mendapatkan. Bisa juga penelitian ini dilanjutkan dengan mempersoalkan bagaimana pengaruh tingkat penerimaan pelajaran tambahan kewiraswastaan terhadap beberapa variabel kriterium, misalnya terhadap motivasi kewiraswastaan, motivasi mendapatkan atau meningkatkan pendapatan, dan perilaku kewiraswastaannya, atau kecepatan mendapatkan pekerjaan/berwiraswasta.

Dengan pendekatan kuantitatif, dapat pula ditelusuri bagaimana hubungan atau pengaruh penerimaan pelajaran tambahan atau pelengkap pendidikan kewiraswastaan terhadap kecermatannya melihat dan memanfaatkan peluang usaha atau peluang kerja yang ada. Pendekatan penelitian kualitatif atau kuantitatif dapat pula difokuskan pada perubahan sikap dan kemampuan kewiraswastaan riil akibat penerapan model dengan desain longitudinal. Studi lain atau studi lanjutan dapat pula diarahkan pada subjek lain di luar peserta kursus wanita. Dapat juga difokuskan pada tema dan kelompok-kelompok wanita tertentu, misalnya studi tentang perkembangan kebutuhan belajar pendidikan kewiraswastaan pada wanita pewiraswasta pemula, wanita pewiraswasta skala kecil dan menengah, dan seterusnya.